



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta ini telah selesai disusun. LKjIP ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Melalui LKjIP ini berbagai capaian serta kendala yang kami hadapi dalam merealisasikan berbagai program yang diamanatkan dapat terlihat dengan jelas.

Sesuai dinamika perkembangan yang terjadi, LKjIP ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Dengan tersusunnya LKjIP Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LKjIP Tahun 2024 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP tahun anggaran yang akan datang.



Jakarta, 3 Januari 2025
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Amien Fajar Ocham

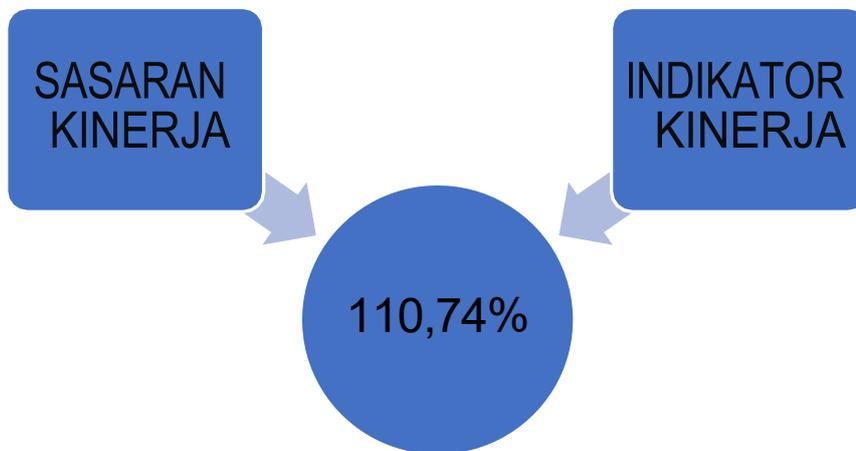
RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang kini menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta yang berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian di wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Jakarta serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

KINERJA ANGGARAN



KINERJA ORGANISASI



DAFTAR TABEL

Table 1. Susunan Organisasi Balai Harta Peninggalan.....	8
Tabel 2. Sasaran Strategis Balai Harta Peninggalan.....	17
Tabel 3. Alokasi Anggaran Belanja.....	19
Tabel 4. Target Kinerja Tahun 2024.....	20
Tabel 5. Pengukuran Capaian Kinerja.....	23
Tabel 6. Realisasi Kinerja Tahun 2024 (indikator Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan).	23
Tabel 7. Capaian Kinerja Layanan BHP Jakarta Tahun 2024.....	24
Tabel 8. Realisasi Kinerja Tahun 2024 (Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP).....	26
Tabel 9. Realisasi Kinerja Tahun 2024 (Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan).	27
Tabel 10. Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	28
Tabel 11. Pemantauan Risiko Tahun 2024.....	29
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2021 s.d. 2024 (Indikator Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan).	30
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2021 s.d. 2024 (Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP).....	30
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2021 s.d. 2024 (Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan).....	31
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2021 s.d. 2024 (Indikator Perencanaan, Laporan Keuangan dan Citra Positif Balai Harta Peninggalan).....	31
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2021 s.d. 2024.....	32
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan).	33
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP).....	33
Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan).....	34
Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.	35

Tabel 21. Perbandingan Penyerapan anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	40
Tabel 22. Penyerapan Anggaran Tahun 2024	41
Tabel 23. Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024	42
Tabel 24. Capaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA)	48
Tabel 25. Capaian Kinerja pada aplikasi E-Performace.....	49
Tabel 26. Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 (Pertriwulan).	49
Tabel 27. Capaian Kinerja pada E-Monev Bappenas.	50

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I.....	6
PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
C. MAKSUD DAN TUJUAN	10
D. ASPEK STRATEGIS.....	11
E. ISU STRATEGIS.....	12
F. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	12
BAB II.....	14
PERENCANAAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
1. VISI.....	14
2. MISI	14
3. TUJUAN.....	15
4. SASARAN STRATEGIS.....	17
5. ALOKASI ANGGARAN BELANJA.....	19
B. PERJANJIAN KINERJA.....	20
BAB III.....	21
AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. REALISASI ANGGARAN	40
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	46
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	48
BAB IV	52
PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Kendala	52
C. Strategi	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang disusun sebagai tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam LKJIP ini disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari Program Administrasi Hukum Umum di Wilayah beserta dengan analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Harta Peninggalan Jakarta tahun 2024 dimaksudkan untuk melaporkan kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam pencapaian target kinerja Tahun 2024 sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Harta Peninggalan Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- ✓ Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun 2024;
- ✓ Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang;
- ✓ Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Balai Harta Peninggalan Jakarta;
- ✓ Sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang;
- ✓ Sebagai bahan masukan bagi jajaran pimpinan Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam menentukan kebijakan strategis pada masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 merupakan bentuk

pertanggungjawaban instansi kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi dan visi-misi presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun manfaat dari adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai salah satu Unit/Satuan Kerja Mandiri (Eselon III) berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan rencana kerja Program Administrasi Hukum Umum di Wilayah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip - prinsip "*good governance*" dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Balai Harta Peninggalan Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang secara teknis substantif bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan secara administratif dan fasilitatif berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, sebagaimana yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Indonesia terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

- ✓ Balai Harta Peninggalan Medan;
- ✓ Balai Harta Peninggalan Jakarta;
- ✓ Balai Harta Peninggalan Semarang;

- ✓ Balai Harta Peninggalan Surabaya;
- ✓ Balai Harta Peninggalan Makassar.

Sesuai dengan Lampiran ke-II Permenkumham tersebut, Balai Harta Peninggalan Jakarta mempunyai wilayah kerja yang meliputi 8 (delapan) propinsi terdiri dari **DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat.**

Dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021, Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas untuk mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang. Adapun **Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan** diantaranya adalah:

1. Pengurusan dan Penyelesaian Perwalian, selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara;
2. Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampu Anak Dalam Kandungan;
3. Pengurus atas harta peninggalan yang tidak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*);
4. Mewakili dan Mengurus harta kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*);
5. Pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/ tertutup;
6. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Golongan Keturunan Timur Asing;
7. Bertindak selaku Kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah Kepailitan;
8. Penyelesaian Penatausahaan Uang Pihak Ketiga.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021, susunan organisasi Balai Harta Peninggalan terdiri dari:

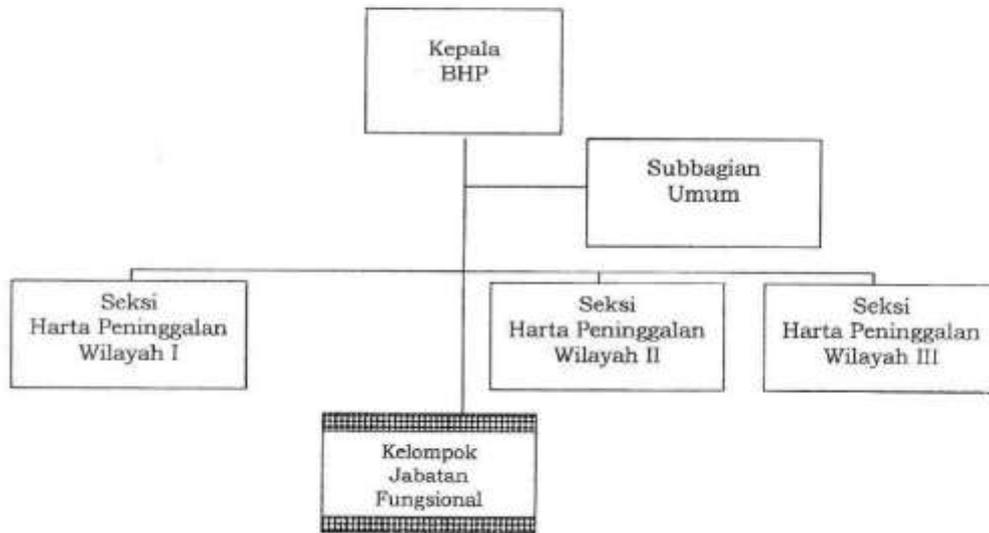
Table 1. Susunan Organisasi Balai Harta Peninggalan

NO.	STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
1.	Kepala	Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan tugas teknis/non teknis sesuai peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di bidang Balai Harta Peninggalan.

NO.	STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
2.	Sub Bagian Umum	Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, fasilitas reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan Balai Harta Peninggalan.
3.	Seksi Harta Peninggalan Wilayah I, II, III	Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid), harta peninggalan tidak terurus (Onbeheerde Nalatenschap), pendaftaran wasiat, pembukaan dan pembacaan wasiat tertutup, pembuatan surat keterangan hak waris, bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan, dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan, penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga, sesuai wilayah kerja yang ditetapkan oleh Ketua Balai Harta Peninggalan.
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam hal pelaksanaan teknis tugas dan fungsinya.

Di bawah ini adalah bagan Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI HARTA PENINGGALAN



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang diberikan pada setiap tahunnya. Hal penting yang perlu dilakukan dalam penyusunan laporan kinerja dimaksudkan untuk melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai terkait hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Harta Peninggalan Jakarta tahun 2024 dimaksudkan untuk melaporkan kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Balai Harta Peninggalan Jakarta;
2. Sebagai informasi untuk memberikan kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta untuk mengetahui capaian kinerja selama periode tahun 2024;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan terhadap dokumen perencanaan pada periode yang datang;
4. Sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang;
5. Sebagai bahan masukan bagi jajaran pimpinan Balai Harta Peninggalan Jakarta

dalam menentukan kebijakan strategis pada masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Harta Peninggalan Jakarta tahun 2024 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

D. ASPEK STRATEGIS

Adapun aspek strategis yang menjadikan Balai Harta Peninggalan Jakarta menjadi penting keberadaannya adalah Balai Harta Peninggalan Jakarta mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang. Di 8 (delapan) wilayah kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

E. ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan organisasi Balai Harta Peninggalan Jakarta tentu saja terdapat beberapa isu strategis yang dianggap dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut beberapa isu strategis pada Balai Harta Peninggalan Jakarta :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dan stakeholder terhadap peran, tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Jakarta sehingga masyarakat dan stakeholder sering bertindak tanpa adanya peran Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam penyelesaian Harta Peninggalan;
2. Penyampaian Penetapan/Keputusan dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama kurang maksimal meskipun telah rutin dilakukan Koordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Jakarta;
3. Lambatnya birokrasi pada stakeholder Pengadilan Niaga dalam pelaksanaan penyelesaian Kepailitan.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika pelaporan Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta Tahun 2024.

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta Tahun 2024.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek dan isu strategis dan sistematika pelaporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja, Utama dan Anggaran Kementearan Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam mencapai target kinerja sesuai dengan

Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Balai Harta Peninggalan Jakarta.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan tahun 2024 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Ir. Joko Widodo adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua dan 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita.

Balai Harta Peninggalan selaku Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh sebab itu, selaku Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mendukung dan melaksanakan visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan **Visi** Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif,
Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden

“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

2. MISI

Adapun sesuai dengan tugas dan fungsi yang di emban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8 yang berbunyi:

- (1) Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya
- (2) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga

negara

(3) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
- c. Mendukung penegakan hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;
- g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik.

Berdasarkan ketujuh unsur tersebut, Balai Harta Peninggalan Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya ikut menyukseskan Visi Presiden melalui Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- ✓ Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
- ✓ Mendukung penegakan hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- ✓ Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atas visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan

pemasyarakatan serta membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;

- d. Terlindunginya hak asasi manusia;
- e. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- f. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Asing/Warga Negara Indonesia yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
- g. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan ketujuh tujuan yang hendak dicapai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Balai Harta Peninggalan Jakarta turut mendukung tercapainya tujuan tersebut melalui :

- ✓ Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
- ✓ Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/income) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan dan dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP pada satuan kerja pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada tahun 2024 terjadi perubahan rencana strategis pada Kementerian Hukum dan HAM sehingga terdapat perubahan pada indikator sasaran kegiatan Balai Harta Peninggalan. Adapun yang menjadi sasaran strategis Balai Harta Peninggalan Jakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis Balai Harta Peninggalan Jakarta Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Strategis Balai Harta Peninggalan

Program Administrasi Hukum Umum

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2024	2024	2021	2022	2023	2024	
5251 – PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH										
SK 10	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum									Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta
	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	82%	84%	86%	90%	2.216.382.000	2.507.905.000	2.681.822.000	3.431.832.000	
SK	Terwujudnya layanan									Kepala Balai

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2024	2024	2021	2022	2023	2024	
7	administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi di Wilayah yang efektif dan efisien									HartaPeninggalan Jakarta
	Perencanaan Laporan Keuangan dan Citra Positif Balai Harta Peninggalan	90%	90%	90%		5.996.834.000	12.966.221.000	7.896.445.000		
	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP				100%				8.086.455.000	
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan				3,1 indeks					

5. ALOKASI ANGGARAN BELANJA

Balai Harta Peninggalan Jakarta melaksanakan 2 (dua) program dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Adapun rincian perencanaan kinerja dan anggaran Balai Harta Peninggalan Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Alokasi Anggaran Belanja

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang Diselesaikan	90%	Rp. 3.431.832.000,-
Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya di Balai Harta Peninggalan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	Rp. 8.086.455.000,-
			Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks	

B. PERJANJIAN KINERJA

Balai Harta Peninggalan Jakarta telah menandatangani suatu penetapan kinerja pada awal tahun 2024 antara Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4. Target Kinerja Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(2)	(3)	(4)
Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang Diselesaikan	90%
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.431.832.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.086.455.000,-
	JUMLAH	Rp. 11.518.287.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta merupakan Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang secara teknis terkait langsung dengan Direktorat Administrasi Hukum Umum. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor BHP Jakarta yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode tersebut.

Pada bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta Tahun 2024 serta aspek keuangan yang mempengaruhi pencapaian target kinerja. Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan realisasi dari Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja outcome.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan melaksanakan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dasar perhitungan pencapaian kinerja diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Manual Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengukuran Kinerja tahun 2024 berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama Balai Harta Peninggalan Jakarta yang termuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.OT.02.02 TAHUN 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024.

Formulasi perhitungan capaian kinerja pada Indikator Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Balai Harta Peninggalan Jakarta dihitung berdasarkan jumlah seluruh permohonan yang diterima pada tahun 2024 dibagi dengan jumlah seluruh permohonan yang diselesaikan pada tahun yang sama, dikali dengan 100% untuk mendapatkan presentase realisasi.

Sedangkan, perhitungan realiasi pada Indikator Program Dukungan Manajemen Satker dihitung berdasarkan :

1. Prosentase penyelesaian pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi selama tahun 2024, yaitu perbandingan antara rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait BHP yang terlaksana dibagi dengan total rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait BHP dikalikan 100%.
2. Penilaian atas kepuasan unit kerja lingkup Balai Harta Peninggalan Jakarta terhadap Layanan Kesekretariatan. Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan yang diisi oleh pegawai melalui link <https://indekbsk.kemenkumham.go.id/s/ILKBSK2024>, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden.

Proportionate Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.

Grading Sistem grading digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Tabel 5. Pengukuran Capaian Kinerja

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	Jumlah Permohonan Masuk -----x 100 % Jumlah Permohonan Selesai	Realisasi -----x 100 % Target
Program dukungan Manajemen	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	Jumlah Dokumen Target -----x 100 % Jumlah Dokumen Selesai	Realisasi -----x 100 % Target
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks		

1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN BERJALAN

SASARAN STRATEGIS 1 “Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia”

Pada Sasaran Strategis ini BHP Jakarta memiliki Sasaran Kegiatan “Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan”. Berdasarkan Sasaran Kegiatan tersebut terdapat Indikator Kinerja yaitu “Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang Diselesaikan”. Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6. Realisasi Kinerja Tahun 2024 (indikator Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	101,27%	112,52 %	Tercapai

Formulasi Perhitungan Realisasi :

$$\% = \frac{\text{Jumlah permohonan layanan BHP yang ditindaklanjuti dan/atau diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh permohonan layanan BHP yang diterima}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{637}{629} \times 100 \%$$

$$= 101,27 \%$$

Formulasi Perhitungan Capaian :

$$\% = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{101,27 \%}{90\%} \times 100 \%$$

$$= 112,52 \%$$

Adapun hasil capaian kinerja pada penyelesaian permohonan pada tahun 2024 disajikan dalam matriks berikut ini :

Tabel 7. Capaian Kinerja Layanan BHP Jakarta Tahun 2024

CAPAIAN KINERJA LAYANAN BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA			
JANUARI S.D. DESEMBER 2024			
BHP	LAYANAN	JUMLAH PERMOHONAN	REALISASI SELESAI
JAKARTA	Layanan Perwalian dan Pengampuan		
	Layanan Berita Acara Penyempahan Wali (Perwalian)	68	100
	Salinan Surat Berita Acara Penyempahan Wali	42	45
	Surat Keterangan Persetujuan Wali / Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan Kekayaan	4	3
	Salinan Surat Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan / Harta persekutuan, Harta Kekayaan	97	127
	Layanan Pengampu Anak yang Masih Dalam Kandungan	-	-
	Layanan Pengurus atas Diri Pribadi dan Harta Kekayaan Anak-Anak Masih Belum Dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali.	-	-
	Layanan Mewakili Kepentingan Anak-Anak Belum Dewasa Dalam Hal Adanya Pertentangan dengan Kepentingan Wali	-	-
	Layanan Mengurus Harta Kekayaan Anak-Anak Belum Dewasa Dalam Hal Pengurusan itu Dicabut oleh wali mereka	-	-
	Layanan Pengampuan	26	24

CAPAIAN KINERJA LAYANAN BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA JANUARI S.D. DESEMBER 2024			
BHP	LAYANAN	JUMLAH PERMOHONAN	REALISASI
			SELESAI
	Pendaftaran Akta Wasiat	62	62
	Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris	104	66
	Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia	4	3
	Salinan Surat Berita Acara Penghadapan	198	192
	Salinan Surat Keterangan Hak Waris	14	14
	Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir (<i>Afwezigheid</i>)	4	-
	Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Peninggalan Tak Terurus (<i>Onbeheerde Nataleschap</i>)	-	-
	Layanan Kepailitan	5	-
	Layanan BPJS Tenaga Kerja	-	-
	Penerimaan Transfer Dana dari Bank	1	1
	TOTAL	629	637

- Jumlah permohonan yang masuk pada tahun 2024 sebanyak 629 permohonan.
- Penyelesaian permohonan sebanyak 637 permohonan merupakan penyelesaian permohonan tahun 2024 dan permohonan yang berasal dari tahun sebelumnya.
- Sedangkan untuk permohonan yang masih proses pada tahun 2024 yang akan diselesaikan pada periode berikutnya adalah sebanyak 90 permohonan, yang sebagian besar merupakan perkara kepailitan sebanyak 44 perkara yang membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya.
- Kendala yang dihadapi pada penyelesaian permohonan antara lain karena :
 - 1) Wali tidak merespon panggilan untuk disumpah setelah dikirim 2 kali surat panggilan
 - 2) Pemohon SKHW tidak dapat memenuhi persyaratan, sehingga membutuhkan waktu bagi pemohon untuk melengkapi persyaratan
 - 3) Dalam hal kepailitan ialah :
 - a. Kerap terjadi gagal Lelang karena tidak ada yang mau membeli asset pailit, sehingga membutuhkan waktu untuk dilaksanakan lelang ulang.
 - b. Pergantian Hakim Pengawas di lingkungan Pengadilan Niaga yang membutuhkan waktu yang cukup lama.
 - c. Debitor tidak jujur dalam memberikan keterangan terkait aset pailit, sehingga proses penelusuran aset memakan waktu.

- 4) Dalam hal Afwezigheid ialah sulitnya menjual asset afwezigheid dikarenakan tidak adanya surat-surat (sertifikat) atas rumah/tanah afwezigheid.

SASARAN STRATEGIS 2 “Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien”

Pada Sasaran Strategis ini BHP Jakarta memiliki Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP”. Berdasarkan Sasaran Kegiatan tersebut terdapat Indikator Kinerja yaitu “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP” dan “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan”.

Pada Indikator “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP” mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja yaitu “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP” merepresentasikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan BHP. Sedangkan Indikator “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan” merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap layanan kesekretariatan pada tahun berjalan.

a. Indikator Kinerja “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP”

Tabel 8. Realisasi Kinerja Tahun 2024 (Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	100 %	Tercapai

Formulasi Perhitungan Realisasi :

$$\% \text{ Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{\text{Rencana Aksi RB terkait BHP yang terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB terkait BHP}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{114}{114} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Rencana Aksi yang telah dilaksanakan oleh BHP Jakarta sebesar 114 pemenuhan data dukung sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2024.

Formulasi Perhitungan Capaian :

$$\% = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Pencapaian ini merupakan komitmen BHP Jakarta dalam membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dengan melakukan serangkaian kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja BHP Jakarta selama tahun 2024.

b. Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan”

Tabel 9. Realisasi Kinerja Tahun 2024 (Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks	3,94 indeks	127 %	Tercapai

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan yang diisi oleh pegawai melalui link <https://indekbsk.kemenkumham.go.id/s/ILKBSK2024>, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden.

- Proportionate Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.
- Grading Sistem grading digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta Tahun 2024 dirangkum dalam matriks berikut :

Tabel 10. Realisasi Kinerja Tahun 2024

INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	$\frac{\text{Jumlah permohonan selesai}}{\text{Jumlah permohonan masuk}} \times 100 \%$ $\frac{637}{629} \times 100 \% = 101,27 \%$	Realisasi $\frac{101,27}{90} \times 100 \% = 112,52\%$ Target 90
Program Dukungan Manajemen	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	$\frac{\text{Jumlah Dokumen selesai}}{\text{Jumlah Dokumen target}} \times 100 \%$ $\frac{114}{114} \times 100 \% = 100 \%$	Realisasi $\frac{100\%}{100\%} \times 100 \% = 100 \%$ Target 100%
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks	3,94 indeks	127%

Pada tahun 2024 BHP Jakarta telah berhasil mencapai target yang ditentukan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani Kepala BHP Jakarta pada awal tahun 2024. Adapun salah satu upaya dalam pencapaian kinerja, BHP Jakarta telah melakukan mitigasi risiko dan melakukan pengendalian risiko yang telah tersaji dalam matriks Pemantauan Risiko Tahun 2024. Beberapa upaya telah dilakukan pada tahun 2023 namun, baru diimplementasikan pada tahun 2024 adalah pembuatan database perwalian dan pengampunan serta melaksanakan sosialisasi perwalian kepada stakeholder BHP Jakarta.

Adapun Pemantauan Risiko yang telah dilaksanakan Balai Harta Peninggalan Jakarta pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Pemantauan Risiko Tahun 2024

PEMANTAUAN RISIKO											
Unit Pemilik Risiko						: Balai Harta Peninggalan Jakarta					
Periode Penerapan						2024					
No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Membuat database perwalian	Data base	1	1	100	Tidak terdapat database perwalian yang terintegrasi	90	90	90%	10%	-
2	Membuat database pengampuan	Data base	1	1	100	Tidak terdapat database pengampuan yang terintegrasi	90	90	90%	10%	-
3	Melaksanakan sosialisasi perwalian kepada stakeholder BHP Jakarta	Laporan	1	1	100	Wali tidak menghadap setelah dipanggil BHP Jakarta	90	90	90%	10%	-

2. PERBANDINGANN REALISASI KINERJA TAHUN BERJALAN DENGAN BEBERAPA TAHUN SEBELUMNYA

SASARAN STRATEGIS 1 “Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia”

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2021 s.d. 2024 (Indikator Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan)

INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	PERSENTASE REALISASI KINERJA 2021	PERSENTASE REALISASI KINERJA 2022	PERSENTASE REALISASI KINERJA 2023	PERSENTASE REALISASI KINERJA 2024
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	109,75%	96,52%	106,9%	112,52%

Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja yaitu “Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang Diselesaikan” mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagian besar berasal dari penyelesaian Perwalian yang berasal dari permohonan tahun lalu dan tindak lanjut dari pengiriman salinan Penetapan Pengadilan ke BHP Jakarta yang kemudian di tindaklanjuti hingga proses perwalian itu selesai.

SASARAN STRATEGIS 2 “Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien”

a. Indikator Kinerja “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP”

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2021 s.d. 2024 (Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP)

INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	PERSENTASE REALISASI KINERJA 2021	PERSENTASE REALISASI KINERJA 2022	PERSENTASE REALISASI KINERJA 2023	PERSENTASE REALISASI KINERJA 2024
Program Dukungan Manajemen	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	-	-	-	100%

Pada tahun 2021 s.d. tahun 2023 pengukuran Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP belum ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum. Pada tahun 2024 terjadi perubahan Rencana Strategis

Kementerian sehingga merubah Perjanjian Kinerja setiap Unit Pelaksana Teknis termasuk Balai Harta Peninggalan Jakarta, sehingga BHP Jakarta tidak dapat menyajikan perbandingan atas Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

b. Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan”

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2021 s.d. 2024 (Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan)

INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	PERSENTASE REALISASI KINERJA 2021	PERSENTASE REALISASI KINERJA 2022	PERSENTASE REALISASI KINERJA 2023	PERSENTASE REALISASI KINERJA 2024
Program Dukungan Manajemen	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	127%

Pada tahun 2021 s.d. tahun 2023 pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan belum ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum. Pada tahun 2024 terjadi perubahan Rencana Strategis Kementerian sehingga merubah Perjanjian Kinerja setiap Unit Pelaksana Teknis termasuk Balai Harta Peninggalan Jakarta, sehingga BHP Jakarta tidak dapat menyajikan perbandingan atas Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun pada tahun 2021 s.d. 2023 pengukuran kinerja pada Program Dukungan Manajemen sebagai berikut :

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2021 s.d. 2024 (Indikator Perencanaan, Laporan Keuangan dan Citra Positif Balai Harta Peninggalan)

INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	PERSENTASE REALISASI KINERJA 2021	PERSENTASE REALISASI KINERJA 2022	PERSENTASE REALISASI KINERJA 2023	PERSENTASE REALISASI KINERJA 2024
Program Dukungan Manajemen	Perencanaan, Laporan Keuangan dan Citra Positif Balai Harta Peninggalan	100%	100%	108,6%	-

Secara keseluruhan perbandingan capaian kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta dari tahun 2021 s.d. 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2021 s.d. 2024

INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA 2021	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA 2022	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA 2023	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA 2024
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	109,75%	96,52%	106,9%	112,52%
Program dukungan Manajemen	Perencanaan, Laporan Keuangan dan Citra Positif Balai Harta Peninggalan.	100%	100%	108,6%	-
	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	-	-	-	100%
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	3,94 indeks (127%)

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D. TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
SASARAN STRATEGIS 1 “Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia”

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
 (Indikator Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan)

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5251 – PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH									
SK 10	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum								
	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	82%	84%	86%	90%	109,75%	96,52%	106,9%	112,52%

Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja yaitu “Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan” selalu melebihi target yang ditetapkan dalam Sasaran Strategis Kementerian Hukum. Meskipun terjadi penurunan capaian pada tahun 2022 dikarenakan tahun ini merupakan awal mula masa “New Normal” atau Adaptasi Kebiasaan Baru dari Pandemi Covid 19 beralih ke kondisi normal.

SASARAN STRATEGIS 2 “Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien”

a. Indikator Kinerja “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP”

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
 (Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP)

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5251 – PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH									
SK 7	Terwujudnya layanan administrasi dan fasilitatif Layanan Administrasi di Wilayah yang Efektif dan Efisien								

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	-	-	-	100%	-	-	-	100%

Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja yaitu “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP” hanya terukur pada tahun 2024 karena pada tahun-tahun sebelumnya indikator ini belum diatur dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum.

b. Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan”

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan)

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5251 – PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH									
SK 7	Terwujudnya layanan administrasi dan fasilitatif Layanan Administrasi di Wilayah yang Efektif dan Efisien								
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	3,1 indeks	-	-	-	3,94 indeks

Dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Balai Harta Peninggalan Jakarta telah melaksanakan program-prgram kerja sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala BHP Jakarta pada setiap awal tahun anggaran. Berikut matriks perbandingan realisasi s.d. tahun 2024 dengan target jangka menengah :

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5251 – PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH									
SK 10	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum								
	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	82%	84%	86%	90%	109,75%	96,52%	106,9%	112,52%
SK 7	Terwujudnya layanan administrasi dan fasilitatif Layanan Administrasi di Wilayah yang Efektif dan Efisien								
	Perencanaan Laporan Keuangan dan Citra Positif Balai Harta Peninggalan	90%	90%	90%	-	100%	100%	108,6%	-
	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	-	-	-	100%	-	-	-	100%
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	3,1 indeks	-	-	-	3,94 indeks

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat disajikan, karena hingga saat ini belum tersedia standar nasional yang dapat dijadikan acuan terhadap target kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta. Sebagai alternatif, analisis kinerja dilakukan dengan mengacu pada target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang selanjutnya diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja dan ditandatangani oleh Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta pada awal tahun 2024.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

a. Kepemimpinan yang Efektif

Pimpinan Balai Harta Peninggalan Jakarta menunjukkan komitmen yang kuat dalam pencapaian target kinerja. Kepemimpinan yang komunikatif, visioner, dan responsif terhadap perubahan menjadi faktor penting dalam mengarahkan unit kerja secara optimal.

b. Perencanaan Strategis dan Pelaksanaan yang Terukur

BHP Jakarta telah menyusun perencanaan strategis berbasis kinerja (SAKIP) secara sistematis, dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan realistis. Penyesuaian antara rencana kerja dan realisasi di lapangan dilakukan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi internal.

c. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi dalam pelayanan publik seperti pemanfaatan layanan digital, penggunaan email kedinasan untuk permohonan layanan dalam proses administrasi telah mempercepat proses layanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

d. Kualitas Sumber Daya Manusia

SDM yang kompeten, berdedikasi, dan terlatih secara teknis dan administratif mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Pelatihan berkala dan peningkatan kapasitas pegawai turut memperkuat kinerja.

e. Kerja Sama dan Koordinasi yang Solid

Koordinasi yang baik antar bagian serta sinergi dengan instansi eksternal seperti pengadilan, Kantor Pertanahan, dan kementerian lain, memungkinkan proses pengelolaan harta peninggalan berjalan lebih efektif dan efisien.

f. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan aplikasi e-Performance, pelaporan online, dan media sosial sebagai sarana publikasi layanan publik memperluas jangkauan informasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

g. Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur

Terciptanya budaya kerja yang disiplin, tanggap terhadap tugas, dan berorientasi hasil telah membentuk lingkungan kerja yang produktif dan fokus pada pencapaian target organisasi.

h. Evaluasi dan Umpan Balik yang Konsisten

Penerapan sistem evaluasi kinerja secara berkala, baik internal maupun eksternal (dari Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, dan stakeholder lainnya), memberikan umpan balik konstruktif yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terus berupaya mengoptimalkan kinerja melalui efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Efisiensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan anggaran, pemanfaatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga pemanfaatan waktu kerja secara efektif.

- a. Dalam aspek anggaran, BHP Jakarta telah menunjukkan kinerja yang efisien melalui perencanaan yang matang dan realisasi anggaran yang tepat sasaran. Seluruh alokasi anggaran diarahkan pada kegiatan prioritas yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Pengawasan internal secara berkala juga turut memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pada aspek sumber daya manusia, BHP Jakarta menerapkan prinsip efisiensi melalui penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Kendati jumlah pegawai relatif terbatas, namun tetap mampu menjalankan tugas pelayanan hukum yang mencakup delapan provinsi dalam wilayah kerjanya, berkat pembagian tugas yang efektif dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, peningkatan kapasitas pegawai dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan internal yang efisien dari segi biaya.
- c. Sarana dan prasarana kerja dimanfaatkan secara optimal dengan pendekatan pemeliharaan preventif dan penggunaan berbasis kebutuhan. Pemanfaatan teknologi informasi turut mendorong efisiensi operasional, terutama dalam pengurangan penggunaan kertas dan alat tulis kantor melalui digitalisasi proses administrasi dan layanan.
- d. Efisiensi juga tercermin dari manajemen waktu kerja yang efektif. Penerapan prosedur operasional standar (SOP) dalam setiap lini pelayanan memungkinkan penghematan waktu kerja dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Monitoring dan evaluasi kinerja harian serta mingguan dilakukan untuk memastikan seluruh waktu

kerja dimanfaatkan secara produktif sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya pada BHP Jakarta merupakan hasil dari sinergi antara perencanaan strategis, tata kelola internal yang baik, serta komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya guna. Ke depan, BHP Jakarta akan terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2024, Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta telah mencatatkan pencapaian kinerja yang signifikan, seiring dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis yang mendukung target organisasi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari implementasi program kerja yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pelaksanaan tugas dan fungsi BHP secara terukur dan akuntabel.

Beberapa program dan kegiatan utama yang menjadi faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain:

a. Penguatan Pelayanan Publik melalui Penciptaan Inovasi

Melalui Inovasi MITBAR (Mitra Balai Harta Peninggalan) BHP Jakarta berhasil menjangkau masyarakat yang berada di delapan provinsi wilayah kerja tanpa harus datang langsung. BHP Jakarta akan mendatangi pemohon dan melakukan kerjasama dengan mitra kerja dalam hal ini Kelurahan pada 8 wilayah kerja BHP Jakarta dalam pemberian layanan penyempahan wali.

b. Program Diseminasi Informasi dan Edukasi Hukum

BHP Jakarta secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan publikasi melalui media sosial, website, media cetak, serta kegiatan tatap muka seperti penyuluhan hukum dan konsultasi publik. Program ini memperluas pemahaman masyarakat terkait tugas dan fungsi BHP, serta meningkatkan akses terhadap layanan hukum.

c. Peningkatan Kapasitas SDM

Kegiatan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis internal, serta pendampingan tugas oleh pejabat fungsional senior terbukti meningkatkan kinerja individu maupun tim. Kegiatan ini juga menciptakan kultur kerja yang adaptif terhadap dinamika tugas dan regulasi.

d. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

BHP Jakarta secara konsisten menerapkan aplikasi e-Performance sebagai alat ukur kinerja pegawai dan satuan kerja. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan

secara berkala memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan efektif, serta mampu mengidentifikasi kendala secara dini untuk segera ditindaklanjuti.

e. Penguatan Koordinasi Dengan Instansi Terkait

Dalam menjalankan tugasnya, BHP Jakarta menjalin kerja sama yang erat dengan instansi terkait, seperti Pengadilan, Kantor Pertanahan, Kelurahan dan Notaris. Kegiatan koordinasi ini berperan penting dalam mempercepat proses penyelesaian pengurusan harta peninggalan dan memperkuat jejaring kerja antar-lembaga.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas keuangan Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta diuraikan sebagai berikut:

Tabel 21. Perbandingan Penyerapan anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

KEGIATAN	TAHUN 2023				TAHUN 2024			
	PAGU	REALISASI	SISA	%	PAGU	REALISASI	SISA	%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.618.500.000	Rp. 2.454.682.917	Rp.163.817.083	93,74%	Rp. 3.431.832.000	Rp. 3.221.597.599	Rp. 210.234.401	93,87%
Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya di Balai Harta Peninggalan	Rp. 7.896.445.000	Rp.7.460.638.811	Rp. 435.806.189	94,48%	Rp. 8.086.455.000	Rp. 7.858.164.859	Rp. 228.290.141	97,18%

Realisasi anggaran tahun 2024, secara umum capaian realisasi anggaran Balai Harta Peninggalan Jakarta kurang dari 100%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 realisasi anggaran Balai Harta Peninggalan Jakarta adalah sebesar **Rp. 11.079.762.458,-** dengan presentase rata-rata **96,19%** dari total anggaran sebesar **Rp. 11.518.287.000,-**. Jika dibandingkan dengan pagu dan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya (Tahun 2023), terdapat peningkatann atas jumlah realisasi anggaran Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 22. Penyerapan Anggaran Tahun 2024

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	PAGU	0	3,431,832,000	0	0	0	0	0	0	0	3,431,832,000
		REALISASI	0.00%	3,221,597,599 (93.87%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,221,597,599 (93.87%)
		SISA	0	210,234,401	0	0	0	0	0	0	0	210,234,401
2	6230 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	PAGU	2,266,268,000	3,728,030,000	2,092,157,000	0	0	0	0	0	0	8,086,455,000
		REALISASI	2,243,628,443 (99.00%)	3,589,151,932 (96.27%)	2,012,857,484 (96.21%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,845,637,859 (97.02%)
		SISA	22,639,557	138,878,068	79,299,516	0	0	0	0	0	0	240,817,141
GRAND TOTAL		PAGU	2,266,268,000	7,159,862,000	2,092,157,000	0	0	0	0	0	0	11,518,287,000
		REALISASI	2,243,628,443 (99.00%)	6,810,749,531 (95.12%)	2,012,857,484 (96.21%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	11,067,235,458 (96.08%)
		SISA	22,639,557	349,112,469	79,299,516	0	0	0	0	0	0	451,051,542

2. Realisasi PNBP Tahun 2024

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Balai Harta Peninggalan Jakarta sebesar Rp. 684.793.320,- (enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah permohonan sebesar 694 permohonan.

Tabel 23. Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Tarif	Jumlah Permohonan	Total Penerimaan
1.4	HARTA PENINGGALAN			
1.4.1	Pelaporan Bulanan Wasiat Terdaftar Secara Online	Rp 100.000		
1.4.2	Pemberian Surat Keterangan Wasiat	Rp 500.000		
1.4.3	Pemberian Salinan Surat Keterangan Wasiat yang Hilang atau Rusak	Rp 500.000		
1.4.4	Informasi Data Wasiat Secara Online	Rp 250.000		
1.4.5	Permohonan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus	Rp 5.000.000		
1.4.6	Persetujuan Perpanjangan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus	Rp 10.000.000		
1.4.7	Penerbitan Surat Keterangan Perpanjangan Sementara Kurator dan Pengurus	Rp 1.000.000		
1.4.8	Pemberian Salinan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus yang Hilang atau Rusak	Rp 5.000.000		
1.4.9	Pencarian/Unduh (Search/Download) Data Kurator Secara Online	Rp 50.000		
1.4010	(BHP) Pemberian Berita Acara dan Salinan Surat			
1.401.01	Berita Acara Penyempahan			
1.401.01.1	Penyempahan Wali Tidak Ada Harta			
1.401.01.2	Penyempahan Wali yang Ada Harta	Rp 100.000	50	5.000.000
1.401.01.3	Penyempahan Pengampuan	Rp 200.000	28	5.600.000
1.401.02	Pembuatan Berita Acara Kehamilan	Rp 50.000		-
1.401.03	Salinan Surat			-
1.401.03.1	Berita Acara Penghadapan	Rp 20.000	187	3.740.000

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Tarif	Jumlah Permohonan	Total Penerimaan
1.401.03.2	Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta Kekayaan	Rp 20.000	112	2.240.000
1.401.03.3	Berita Acara Pembuatan Penyempahan	Rp 20.000	102	2.040.000
1.401.03.4	Surat Keterangan Hak Waris	Rp 20.000	68	1.360.000
1.401.03.5	Keterangan Persetujuan kepada Wali/Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan/Kekayaan	Rp 100.000		-
1.401.03.6	Berita Acara Kehamilan	Rp 20.000		-
1.4011	(BHP) Pendaftaran Akta Wasiat	Rp 200.000	67	13.400.000
1.4012	(BHP) Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia	Rp 500.000	3	1.500.000
1.4013	(BHP) Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris	Rp 200.000	71	14.200.000
1.4014	(BHP) Surat Keterangan Persetujuan kepada Wali/Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan/Kekayaan	Rp 200.000	5	1.000.000
1.4015	(BHP) Penjualan dan Penyelesaian Harta Kekayaan Ketidakhadiran, Tidak Terurus, dan Kepailitan			
1.4015.1	Penjualan Harta Kekayaan Barang Tetap dan/atau Barang Bergerak	Rp 2,5 % Dari Hasil Penjualan		
1.4015.2	Penyelesaian Harta Kekayaan Solvent dalam hal			
1.4015.2.1	Balai Harta Peninggalan Selaku Pelaksana Wali Sementara atau pelaksana Harta Tak Terurus atau Pelaksana Ketidakhadiran	Rp 7 % Dari Jumlah Harta Peninggalan		
1.4015.2.2	Balai Harta Peninggalan Selaku Pengurus dan Pengelola Harta Kekayaan Ketidakhadiran atau Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Pengurusan Berakhir Sebelum Batas Waktu Penyelesaian	Rp 3,5% Dari Jumlah Seluruh Kekayaan/ Harta Peninggalan		

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Tarif	Jumlah Permohonan	Total Penerimaan
1.4015.2.3	Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas	Rp 3,75 % Dari Jumlah Seluruh Harta Peninggalan Dan 1,5 % Dari Jumlah Hutang Peninggalan		
1.4015.2.4	Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas dan Pengurusan Berakhir Sebelum Waktunya	Rp 2 % Dari Kekayaan		
1.4016	(BHP) Kepailitan			
1.4016.1	Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Perdamaian			
1.4016.1.1	Nilai Utang sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)	5% dari nilai utang yang harus dibayar		
1.4016.1.2	Nilai Utang di atas Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)	3% dari nilai utang yang harus dibayar		
1.4016.1.3	Nilai Utang di atas Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	2% dari nilai utang yang harus dibayar		
1.4016.1.4	Nilai utang di atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	1% dari nilai utang yang harus dibayar		
1.4016.2	Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Pemberesan			
1.4016.2.1	Nilai Hasil Pemberesan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)	7.5% dari nilai hasil pemberesan di luar utang	1	634.713.320
1.4016.2.2	Nilai Hasil Pemberesan di atas Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)	5.5% dari nilai hasil pemberesan di luar utang		
1.4016.2.3	Nilai Hasil Pemberesan di atas Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	3.5% dari nilai hasil pemberesan di luar utang		

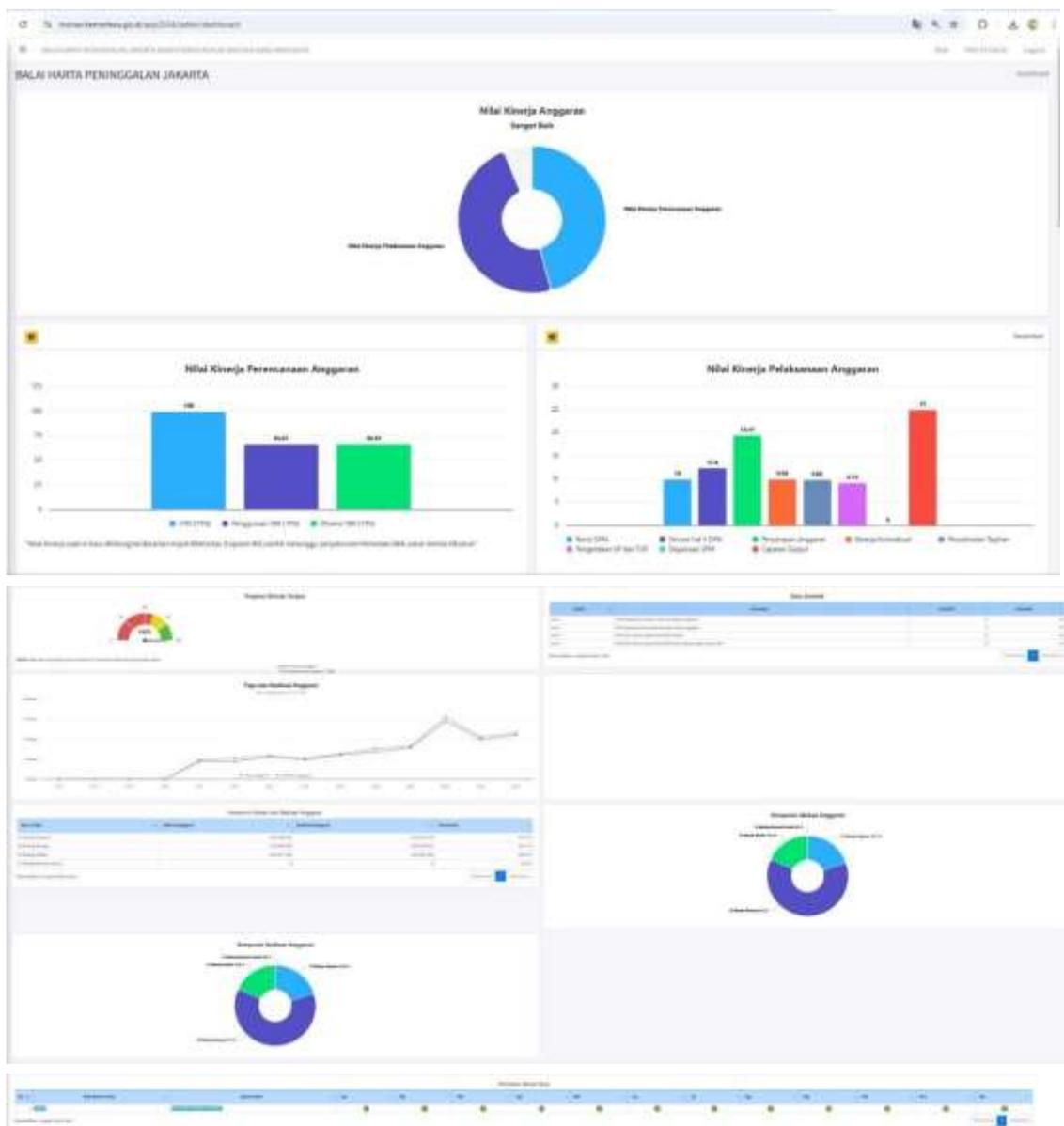
No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Tarif	Jumlah Permohonan	Total Penerimaan
1.4016.2.4	Nilai Hasil Pemberesan di atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	2% dari nilai hasil pemberesan di luar utang		
1.4016.3	Dalam Hal Pernyataan Pailit Dibatalkan di Tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) Besarnya Imbalan Kurator Negara (BHP) Dibebankan Kepada Pemohon Pernyataan Pailit atau kepada Pemohon dan Debitur dalam Perbandingan yang Ditetapkan oleh Majelis Hakim	1 % dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari tagihan apabila kreditur sebagai pemohon		
1.4016.4	Penjualan Harta yang dikuasai oleh Kreditur Lain atau Kreditur Pemegang Jaminan Kebendaan	1 % dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari tagihan apabila kreditur sebagai pemohon		
1.4016.5	Penyerahan Uang Pihak Ketiga setelah 30 Tahun	100 % dari penyerahan uang pihak ketiga setelah 30 tahun		
Jumlah			694	684.793.320

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01PR.03 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa capaian kinerja anggaran diukur dengan menggunakan 2 (dua) variable yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%.

1. NILAI KINERJA PADA APLIKASI SMART DJA

Nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA bertujuan untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja untuk memudahkan K/L dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri (self evaluation). Nilai kinerja tersebut diakses melalui <https://smart.kemenkeu.go.id> dengan hasil sebagai berikut:



Pada capaian kinerja SMART DJA Balai Harta Peninggalan Jakarta diketahui bahwa nilai Nilai Kinerja Anggaran mendapat predikat Sangat Baik.

2. NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN KINERJA ANGGARAN (IKPA)

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu:

a. Kualitas perencanaan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulan dan meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja setiap bulan. Adapun bobot pada aspek kualitas perencanaan anggaran sebesar 20 % terdiri dari revisi DIPA dengan bobot sebesar 10 % dan deviasi halaman III DIPA dengan bobot sebesar 10%.

b. Kualitas pelaksanaan anggaran yaitu :

- 1) Mendorong akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan;
- 2) Mendorong penyampaian data kontrak tepat waktu dan percepatan belanja kontraktual sejak awal;
- 3) Mendorong percepatan pembayaran belanja kontraktual;
- 4) Meningkatkan ketetapan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dan optimalisasi penggunaan UP dan TUP;
- 5) Meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukkan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.

Adapun bobot pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran adalah 50 % terdiri dari penyerpaan anggaran dengan bobot sebesar 20 %, belanja kontraktual dengan bobot sebesar 10 %, penyelesaian tagihan dengan bobot sebesar 10%, pengelolaan UP dan TUP dengan bobot sebesar 10%, dispensasi SPM dengan bobot sebesar 10%.

c. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas. Pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran memiliki bobot 25 % yaitu pada capaian output.

Berikut IKPA Balai Harta Peninggalan Jakarta tahun 2024 :

Tabel 24. Capaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Selesai Dengan: DISEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Subter	Uraian Subter	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dipenuhi SPM (Pengarang)	Nilai Akhir Nilai Total (Konversi Bobot)
						Revisi DPA	Deviasi Anggaran ke DPA	Perserapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengalokasian UP dan TUP	Capaian Output				
1	139	013	06207	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	Nilai	100,00	82,98	97,34	99,64	99,53	91,90	100,00	95,88	100%	0,00	95,88
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10,00	12,45	19,47	9,96	9,95	9,19	25,00				
					Nilai Aspek	91,34			96,85			100,00				

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran diketahui capaian nilai IKPA pada masing – masing program belum optimal. Nilai rata-rata pada 2 program adalah 95,88. Nilai tersebut sudah memenuhi target yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yakni sebesar 95.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-PERFORMANCE

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi e-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <http://eperformance.kemenkumham.go.id>. Pada Tahun 2024 Balai Harta Peninggalan Jakarta telah mencapai target kinerja yang telah ditentukan berdasarkan Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

3. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum, untuk Indikator Kinerja Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan, Balai Harta Peninggalan Jakarta memperoleh capaian kinerja sebesar 113% dan telah melebihi target sebesar 90%.
4. Program Dukungan Manajemen, untuk Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP, Balai Harta Peninggalan Jakarta Balai Harta Peninggalan Jakarta memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dan telah mencapai target sebesar 100%. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan Balai Harta Peninggalan Jakarta memperoleh capaian kinerja sebesar 3,94 indeks dan telah melebihi target sebesar 3,1 indeks dengan Prosentase capaian sebesar 127%.

Tabel 25. Capaian Kinerja pada aplikasi E-Performace

**PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2024
BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA**

NO	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	KASCADE		WARTU BENTUKAN	TARGET				REALISASI	
				KELAS	MASUK		JENJANG	SATUAN	JUMLAH	(%)		URAIAN
1	Terselenggaranya Pelaksanaan Layanan Balai Harta Peninggalan		Pembesaran Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan Gedaran Kinerja Pegawai:			30 Persegi Triwulan II	TW I	15	Persegi	15	100%	Januari - Februari - Maret
							TW II	45	Persegi	45	100%	April - Mei - Juni
							TW III	75	Persegi	75	100%	Juli - Agustus - September
							TW IV	90	Persegi	102	113%	Oktober - November - Desember
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BHP		Pembesaran Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan BHP Gedaran Kinerja Pegawai:			150 Persegi Triwulan II	TW I	25	Persegi	25	100%	Januari - Februari - Maret
							TW II	50	Persegi	50	100%	April - Mei - Juni
							TW III	75	Persegi	75	100%	Juli - Agustus - September
							TW IV	100	Persegi	100	100%	Oktober - November - Desember
3	Indeks Kepuasan Unit Kerja Layanan Reformasi Birokrasi		Indeks Kepuasan Unit Kerja Layanan Reformasi Birokrasi Gedaran Kinerja Pegawai:			3,1 Indeks Triwulan II	TW I	0	Indeks	0		Januari - Februari - Maret
							TW II	0	Indeks	0		April - Mei - Juni
							TW III	0	Indeks	0		Juli - Agustus - September
							TW IV	3,1	Indeks	2,94	107%	Oktober - November - Desember

2. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Target kinerja Balai Harta Peninggalan Jakarta telah ditentukan berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dengan target dan capaian per triwulan sebagai berikut :

Tabel 26. Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 (Pertriwulan)

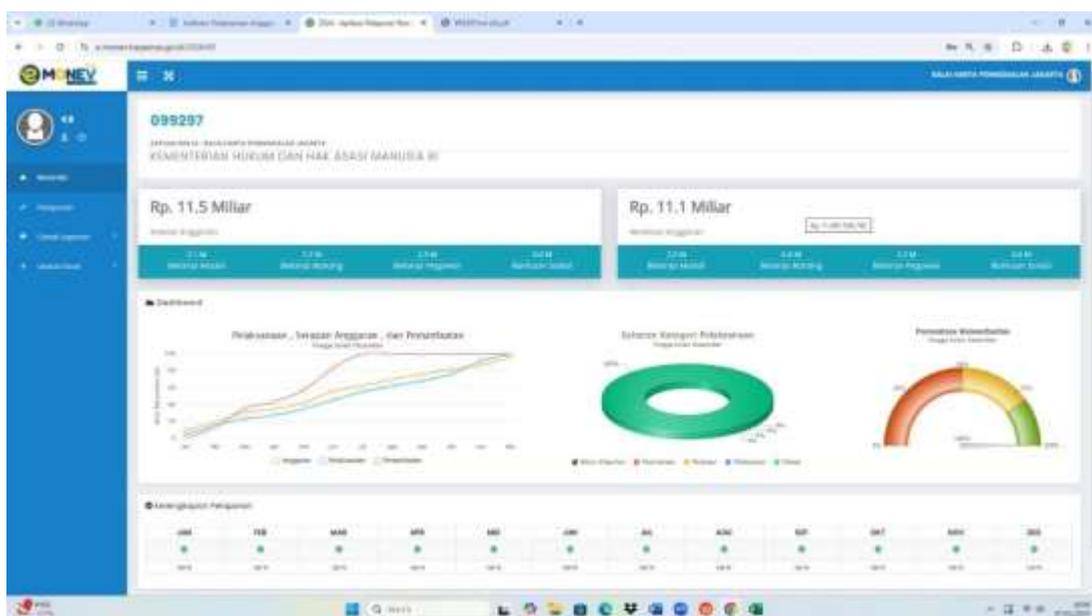
INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	CAPAIAN KINERJA TW I	CAPAIAN KINERJA TW II	CAPAIAN KINERJA TW III	CAPAIAN KINERJA TW IV
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	15%	33,9%	61%	105,21%

INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	CAPAIAN KINERJA TW I	CAPAIAN KINERJA TW II	CAPAIAN KINERJA TW III	CAPAIAN KINERJA TW IV
Program Dukungan Manajemen	Perencanaan, Laporan Keuangan dan Citra Positif Balai Harta Peninggalan.	90%	41%	-	-	-
	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks	3,91 indeks	3,95 indeks	3,97 indeks	3,92 indeks

3. E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi e-Monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian lembaga). Lebih lanjut, aplikasi emonev Bappenas digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Adapun Laporan E-Monev Bappenas pada Balai Harta Peninggalan Jakarta disajikan sebagai berikut :

Tabel 27. Capaian Kinerja pada E-Monev Bappenas



4. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 106 Bab XIV dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Buku I Bab ke-II bagian II dan Ban ke-III Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait nama, kedudukan, domisili dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi.

Berdasarkan hal tersebut Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa, Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Tionghoa/Cina, dan Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia/Pribumi, Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia tidak berlaku lagi (Pasal 106 UU Kewarganegaraan). Oleh sebab itu, dengan dihapuskannya penggolongan kependudukan dan dengan tidak diterbitkannya peraturan pelaksana oleh Pemerintah sebagai pengganti akibat dihapuskannya penggolongan tersebut, maka Balai Harta Peninggalan menjadi lembaga yang berwenang terkait penyelesaian keperdataan individu yang mencakup golongan tersebut di atas.

Oleh sebab itu, potensi kelembagaan Balai Harta Peninggalan menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang dalam hal kepentingan keperdataan untuk seluruh Warga Negara Indonesia sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kegiatan Prioritas Nasional lainnya yang telah dilaksanakan Balai Harta Peninggalan Jakarta pada tahun 2024 yaitu peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM melalui pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meso, diantaranya pelaksanaan Pengisian Arsip Vital pada Aplikasi e-arsip di lingkungan Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan HAM dan Pengisian Surat Keluar Aplikasi Srikandi di lingkungan Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan HAM dimana Balai Harta Peninggalan Jakarta berhasil meraih peringkat II dan III dalam penghargaan dari Biro Umum Kementerian Hukum dan HAM.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, dinyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan adalah salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan HAM RI, yang secara teknis substantif berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan secara administratif dan fasilitatif berada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, oleh karena itu BHP Jakarta secara administrasi menjadi kewenangan Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan HAM RI.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Harta Peninggalan Jakarta merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada laporan kinerja ini, dijelaskan capaian yang telah diwujudkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai mana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan.

Balai Harta Peninggalan Jakarta telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Seluruh target kinerja dari indikator kinerja telah tercapai dengan baik, hal ini dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan pada tahun 2024;
2. Telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan administrasi hukum umum di wilayah kerja dan kegiatan dukungan manajemen dengan baik.

B. Kendala

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Balai Harta Peninggalan Jakarta terdapat beberapa kendala yang dihadapi , yaitu :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait tugas dan fungsi BHP Jakarta sehingga banyak para wali yang melakukan eksekusi harta peninggalan tanpa adanya peran BHP Jakarta.
2. Kurangnya pemahaman stakeholder terkait dalam hal ini perbankan terkait peran dan tuisi BHP Jakarta sehingga pihak perbankan langsung melakukan eksekusi terhadap harta peninggalan yang seharusnya melalui peran BHP Jakarta.
3. Penyampaian Salinan Penetapan/Keputusan dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama kurang maksimal meskipun telah rutin dilakukan penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di 8 (delapan) Provinsi wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Jakarta.

C. Strategi

Di masa yang akan datang, Balai Harta Peninggalan Jakarta senantiasa melakukan perbaikan yang konsisten dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Strategi yang akan ditempuh oleh dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait guna terwujudnya sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Memperbarui standar operasional prosedur pelayanan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan Penyebarluasan informasi layanan kepada masyarakat melalui platform media sosial, maupun melalui website;
4. Peningkatan pemahaman dan keahlian sumber daya manusia terhadap tugas jabatannya;
5. Peningkatan penggunaan teknologi informasi guna peningkatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Terus berkoordinasi dengan Kantor Wilayah dan Eselon I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Jakarta.

**LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA
TAHUN 2024**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amien Fajar Ocham
Jabatan : Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

R. Andika Dwi Prasetya
NIP 196712171991031002

Pihak Pertama,
Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta

Amien Fajar Ocham
NIP 197402232001121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA DENGAN KEPALA KANTOR
DENGAN WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 3.431.832.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp 3.431.832.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 8.065.987.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp 8.065.987.000,-

Jakarta, 18 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta



R. Andika Dwi Prasetya
NIP 196712171991031002

Pihak Pertama,
Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta



Amien Fajar Ocham
NIP 197402232001121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BALAI HARTA PENINGGGALAN JAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amien Fajar Ocham
Jabatan : Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 18 April 2024

Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta

Amien Fajar Ocham
NIP. 197402232001121001

PENGHARGAAN



1. Penghargaan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SDM-03 KP.05.03 Tahun 2024 tanggal 12 September 2024 diberikan kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis dengan kategori "Videografis Terinformatif" dalam acara Webinar Series "Cerdas Bersama BPSDM Hukum dan HAM" Seri 3;



2. Sertifikat Penghargaan dari Biro Umum Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.6-02.KP.05.03 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 diberikan kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta yang meraih peringkat II Hasil Pengisian Arsip Vital pada Aplikasi e-arsip di lingkungan Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan HAM;



3. Sertifikat Penghargaan dari Biro Umum Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.6-02.KP.05.03 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 diberikan kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta yang meraih peringkat III Hasil Pengisian Surat Keluar Aplikasi Srikandi di lingkungan Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan HAM;



4. Piagam Penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nomor : W.10.UM.01.03-2525 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 diberikan kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Terbaik III Pengelolaan BMN dengan Total Aset di bawah 22 Miliar.

KINERJA BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA TAHUN 2024

Kegiatan Administrasi :



Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024



Penandatanganan Ikrar Netralitas ASN dan PPNP Tahun 2024



Penghapusan BMN berupa Barang Inventaris dan Kendaraan Roda Dua



Kegiatan Digitalisasi Arsip



Kegiatan Rapat Pemenuhan Data Dukung Pembangunan Zona Integritas



Kegiatan Rapat Monev Capaian Kinerja dan Anggaran



Kegiatan Rapat Pejabat Struktural dalam rangka Pengawasan Melekat

Kegiatan Teknis :



Penyumpahan Wali atas anak di bawah umur dilakukan di Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta juga dilakukan di kediaman/kelurahan domisili dari Wali.



Kegiatan Pengawasan kepada Wali dari anak yang di bawah umur



Koordinasi dengan instansi terkait dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Jakarta



Penyempahan Wali Pengampu yang dilakukan di Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta dan juga di kediaman Wali Pengampu



Pemeriksaan Setempat terhadap Terampu



Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia



Penandatanganan MoU Tata Cara Pengambilan Saham Afwezigheid PT Bentoel Investama Tbk. oleh Para Pemegang Saham yang ingin melakukan klaim



Berkoordinasi dengan Kelurahan setempat terkait pengurusan Afwezigheid Moeatin Adjab



Serah Terima Saam PT Bank Victoria Syariah kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta



Peninjauan aset rumah CV Sinar Anugerah Lestari Textindo (dalam pailit) di batam



Rapat kreditur pertama pailit PT Cosmeticindo Slimming Utama



Pelaksanaan Pembukaan Lelang PT Kidsplace Technology Development